

# Laporan Kinerja

## UKj

SELAMAT DATANG  
DI DINAS PERDAGANGAN  
KAB. BANTUL



## Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul



## TA. 2018

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Bantul  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta  
Telp/Fax : 0274-367338, 0274-367504.  
Web : [www.perdagangan.bantulkab.go.id](http://www.perdagangan.bantulkab.go.id), Email : [dinas.perdagangan@bantulkab.go.id](mailto:dinas.perdagangan@bantulkab.go.id)



# LAPORAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

2018



## Kata Pengantar

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

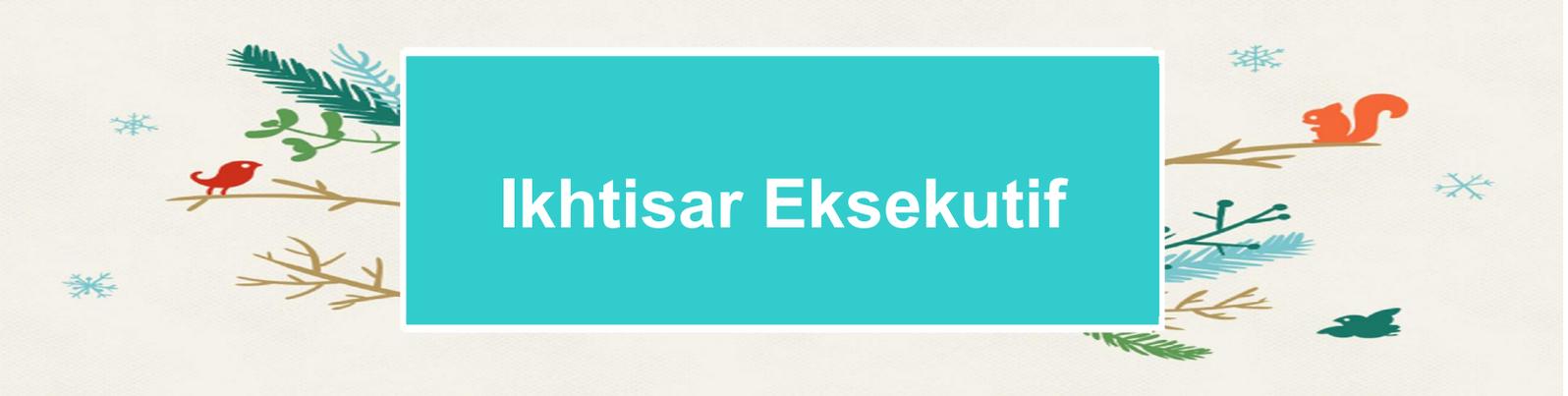
Laporan Kinerja tahun 2018 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja pada tahun 2018, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih jauh Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bantul, Januari 2019  
Kepala Dinas



**Ir. Subiyanta Hadi, MM**  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 195904011985031013



# Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar **140,89%**.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.





## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	8
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
1.3 Isu Strategis	13
1.4 Sistematika Laporan	13
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	15
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017	22
2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran	26
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	29
3.1 Capaian Kinerja	29
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	33
3.3 Akuntabilitas Anggaran	54
3.4 Efisiensi Sumber Daya	56
3.5 Kinerja Lain-lain	57
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 <i>The Next Steps</i>	63



## DAFTAR TABEL

---

Tabel 1.1	SDM Penyelenggara Urusan Perdagangan Tahun 2018	11
Tabel 1.2	Identifikasi Isu-Isu Strategis	13
Tabel 2.1	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2016-2021	16
Tabel 2.2	Keterkaitan Misi dan Tujuan	18
Tabel 2.3	Strategi dan Kebijakan	19
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	20
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Periode 2016-2021	21
Tabel 2.6	Target Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Periode 2016-2021	22
Tabel 2.7	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan Periode 2016-2021	25
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2018	25
Tabel 2.9	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018	26
Tabel 3.1	Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2018	28
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja DINAS PERDAGANGAN Tahun Anggaran 2018	30
Tabel 3.4	Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2018	31
Tabel 3.5	Perbandingan Target Kinerja Tahun(berjalan) dengan Target Akhir RPJMD Dinas Perdagangan Tahun 2018	32
Tabel 3.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	35
Tabel 3.7	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil	36

dan seeda motor

Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Indikator Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	37
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Indikator Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	38
Tabel 3.10	Tingkat Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2018	41
Tabel 3.11	Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2018	41
Tabel 3.12	Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2014-2018	41
Tabel 3.13	Jumlah dan Jenis Pasar di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018	45
Tabel 3.14	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	46
Tabel 3.15	Pengukuran Kinerja Program Pemberdayaan Pedagang	48
Tabel 3.16	Pengukuran Kinerja Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	49
Tabel 3.17	Data Pasar Kondisi Baik Tahun 2018 Di Kabupaten Bantul	50
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Ekspor Tahun 2014-2018	52
Tabel 3.19	Pengukuran Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	53
Tabel 3.20	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018	54
Tabel 3.21	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018	55
Tabel 3.22	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	56
Tabel 3.23	Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2014-2018	58
Tabel 3.24	Nilai rata-rata unsur pelayanan	59
Tabel 3.25	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	60
Tabel 3.26	Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Dinas Perdagangan Tahun 2018	60



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	11
Gambar 1.2	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Golongan	12
Gambar 1.3	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Gambar 1.4	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Pendidikan	12
Gambar 1.5	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Usia	12
Gambar 3.1	Planning Process	27
Gambar 3.2	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	33
Gambar 3.3	<i>Struktur Ekonomi Bantul</i>	34
Gambar 3.4	PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	35
Gambar 3.5	Rata-rata pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	36
Gambar 3.6	Pengendalian BBM	38
Gambar 3.7	Kepala Dinas Kabupaten Bantul menerima sertifikat pasar ber-SNI	47
Gambar 3.8	Jumlah Pedagang Pasar Rakyat Tahun 2014-2018	49
Gambar 3.9	Perkembangan Ekspor 2014-2018	52
Gambar 3.10	Target dan Realisasi PAD Tahun 2018	58
Gambar 3.11	Dokumentasi Berbagai Kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2018	61



# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang



Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya. Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Selain keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka saat ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) juga berdasarkan pada pencapaian target kinerja yang tertera pada Dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2016-2021. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut dijabarkan dalam 10 program 24 kegiatan pada tahun 2018 ini. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap indikator dalam pencapaian sasaran instansi.

Keberhasilan, permasalahan dan solusi menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## 1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi



Perdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul nomor 121 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, tugas pokok dan fungsi serta gambaran Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

## **TUGAS POKOK**

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan

## **FUNGSI**

- a. perumusan kebijakan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait bidang perdagangan.

## **STRUKTUR ORGANISASI**

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
  - 2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2.2 Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset
3. Bidang Pengembangan Perdagangan, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
  - 3.1 Kepala Seksi Pengembangan Ekspor
  - 3.2 Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan
4. Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
  - 4.1 Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan
  - 4.2 Seksi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok
5. Bidang Pengembangan Pasar, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
  - 5.1 Seksi Promosi dan Kemitraan;
  - 5.2 Seksi Pendapatan
  - 5.3 Seksi Sarana dan Prasarana
6. UPT



Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan, 2018, diolah

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

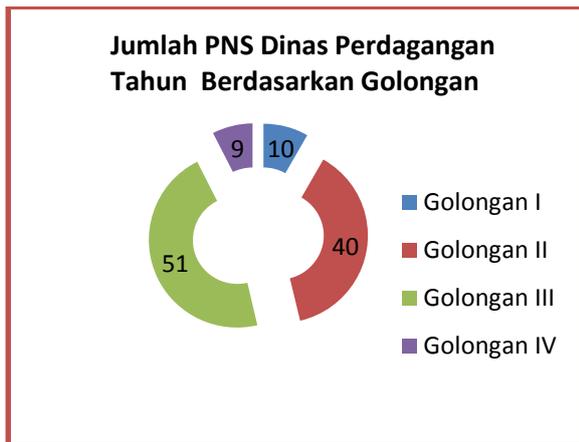
Kualitas dan kuantitas SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan perdagangan Kabupaten Bantul yang berstatus PNS sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sebanyak 121 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas : 1 orang
- b. Sekretariat : 15 orang
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan : 7 orang
- d. Bidang Sarpras dan Distribusi Perdagangan : 9 orang
- e. Bidang Pengembangan Pasar : 81 orang
- f. UPT Metrologi : 9 orang

Tabel 1.1 SDM Penyelenggara Urusan Perdagangan Tahun 2018

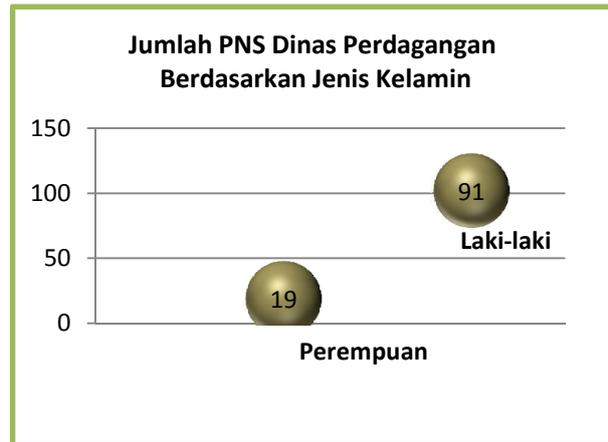
SD	SMP	JENIS PENDIDIKAN					JML	GOLONGAN				JML
		SMA	D1/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
4	7	75	0	12	12	0	110	8	50	43	9	110

Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2018



Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2018

Gambar 1.2 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Golongan



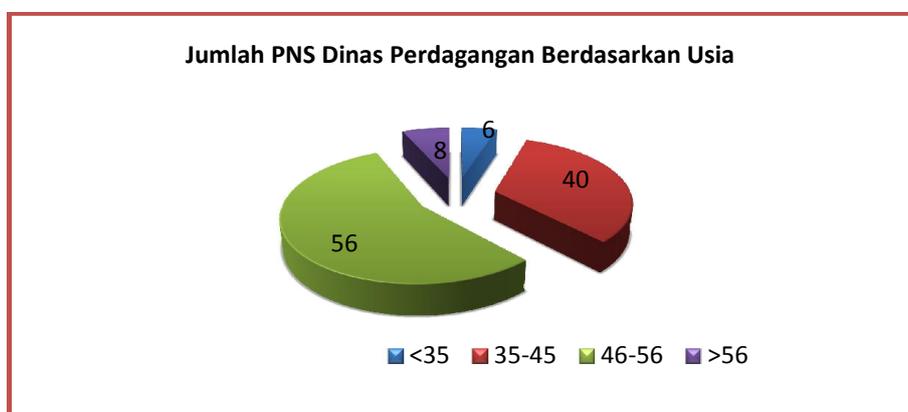
Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2018

Gambar 1.3 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2018

Gambar 1.4 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2018

Gambar 1.5 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Usia

### 1.3. Isu Strategis



Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010). Hasil identifikasi isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2. Identifikasi Isu-Isu Strategis.

DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL/LOKAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laju impor dan produk dari luar daerah</li> <li>- Mekanisme pengendalian distribusi barang serta stabilisasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya serta beredarnya barang-barang tiruan dan ilegal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif</li> <li>- Standar Pelayanan pengawasan barang dan jasa</li> <li>- Pemberitaan media terkait informasi harga yang kurang tepat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan IT dan system informasi pada besarnya pasar perdagangan</li> <li>- Kualitas Data</li> <li>- Kompetensi SDM</li> <li>- Kemudahan pelayanan perizinan usaha</li> <li>- Terbatasnya daya saing produk UMKM</li> <li>- Maraknya rentenir</li> <li>- Kondisi pasar yang terkesan kumuh</li> <li>- Belum tertibnya usaha PKL</li> <li>- Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD</li> <li>- Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan tertib ukur serta standarisasi produk perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat</li> </ul>

Sumber : Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2016-2021

### 1.4. Sistematika Laporan



Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Memuat secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan serta sistematika penyajian;

- Bab II : Perencanaan Kinerja  
Memuat Rencana Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, dan Program untuk pencapaian sasaran;
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja  
Berisi penjelasan singkat tentang capaian indikator kinerja utama tahun 2018, evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta akuntabilitas anggaran;
- Bab IV : Penutup  
Menguraikan ringkasan dan kesimpulan pencapaian kinerja dan pemanfaatannya sebagai umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah.



## BAB II. PERENCANAAN KINERJA



### 2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi agar pendekatan perencanaan strategis ini jelas dan sinergis, selaras dengan visi, misi, potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya, Perencanaan Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Bantul dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparat Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dengan demikian, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah pada Misi 3 dalam RPJMD. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1  
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2016-2021

Visi Kabupaten: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”								
NO.	MISI KABUPATEN	TUJUAN KABUPATEN	TUJUAN DINAS	SASARAN KABUPATEN	SASARAN DINAS	INDIKATOR TUJUAN KABUPATEN	INDIKATOR SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DINAS
	<b>MISI 3:</b> Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah pasar tipe A
Terwujudnya kualitas produk perdagangan			Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan		Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan			
			Meningkatnya pertumbuhan ekspor		Pertumbuhan Nilai Ekspor			

Sumber: RPJMD Bantul dan Renstra Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2018-2021, diolah

### 2.1.1 Visi dan Misi



Keberhasilan pembangunan sektor perdagangan merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016-2021, selaras dengan arah Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2012-2018, serta selaras juga dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2015-2019. Berpedoman pada visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yaitu:

*“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.*

Misi pembangunan Kabupaten Bantul yang sesuai dengan urusan perdagangan adalah misi ketiga yakni “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”.

Adapun misi ketiga yang diemban oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul untuk mencapai visi Kabupaten Bantul dapat diartikan sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan mampu memberikan kepastian terhadap ketersediaan bahan pokok strategis dan stabilitas harga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Oleh karenanya perlu dilakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen.
2. Produktivitas UMKM dan pedagang pasar yang semakin meningkat akan mendorong usaha menjadi berkelanjutan dan semakin berkembang di masa depan. Peningkatan produktivitas tersebut membutuhkan dukungan beberapa aspek yaitu SDM, pemasaran, dan perbaikan manajemen usaha. Selain itu sektor perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri merupakan sektor pendukung PDRB yang cukup signifikan. Untuk itu pengembangan sektor ini harus terus didorong agar pertumbuhan PDRB yang pada akhirnya merupakan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

## 2.1.2 Tujuan dan Sasaran



Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bantul 2016-2021 yang dijabarkan melalui Dinas Perdagangan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2016–2021 yaitu:

1. Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan
2. Terwujudnya kualitas produk perdagangan

Tabel 2.2 Keterkaitan Misi dan Tujuan

No.	Misi	Tujuan
1	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan
		Terwujudnya kualitas produk perdagangan

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2016-2021, diolah

Sasaran yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2016–2021 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pasar rakyat
2. Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan
3. Pertumbuhan Nilai Ekspor

## 2.1.3 Kebijakan, Strategi, dan Program



Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun ke depan, dibutuhkan strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Bantul. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya akan menjadi dasar untuk perumusan program dan kegiatan termasuk program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan

STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Pengembangan ekspor	1. Peningkatan ekspor melalui fasilitasi promosi perdagangan, pengembangan produk dan pemasaran produk
2. Peningkatan sarpras perdagangan	2. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat

3. Peningkatan daya saing sdm	3. Pengembangan aspek SDM
4. Peningkatan pemantauan dan pengawasan distribusi perdagangan dan harga	4. Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga
5. Menyediakan kawasan terpadu untuk pedagang kaki lima(pk1)	5. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL
6. Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang	6. Peningkatan perlindungan konsumen, standarisasi UTP dan pengamanan perdagangan
7. Peningkatan akses permodalan dan akses pasar	7. Peningkatan permodalan melalui dana bergulir kepada pedagang pasar rakyat agar terhindar dari rentenir

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2016-2021, diolah

Pada tabel 2.4 disajikan strategi dan kebijakan untuk masing-masing sasaran yang akan dicapai Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

**VISI:**  
**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**

**MISI:**  
*Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan*

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Peningkatan sarpras perdagangan	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat
		Peningkatan akses permodalan dan akses pasar	Peningkatan permodalan melalui dana bergulir kepada pedagang pasar rakyat agar terhindar dari rentenir
	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Menyediakan kawasan terpadu untuk pedagang kaki lima(pk1)	Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL
		Peningkatan pemantauan dan pengawasan distribusi perdagangan dan harga	Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga
Terwujudnya kualitas produk perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang	Peningkatan perlindungan konsumen, standarisasi UTTP dan pengamanan perdagangan
		Pengembangan ekspor	Peningkatan ekspor melalui fasilitasi promosi perdagangan, pengembang produk dan pemasaran produk
		Peningkatan daya saing sdm	Pengembangan aspek SDM

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2016-2021, diolah

Program Dinas Perdagangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Program pengembangan sektor perdagangan yang sudah ditentukan diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan.

Daftar program operasional Dinas Perdagangan seperti berikut ini:

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
4. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
5. Program Pemberdayaan Pedagang
6. Program Penataan Pasar Rakyat

#### 2.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)



Tujuan urusan perdagangan telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi Kabupaten Bantul. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan tersebut dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Periode 2016-2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi / Perhitungan
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor	$(\text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n - \text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n-1) / \text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n-1 \times 100\%$
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	Jumlah pasar dengan tipe A sampai dengan tahun n
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	$(\text{Nilai ekspor tahun } n - \text{Nilai ekspor tahun } n-1) / \text{Nilai ekspor tahun } n-1 \times 100\%$

Tabel 2.6 Target Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Periode 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
					2018	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor	%	4.61	4.76	5.33	5.62	5.95
		Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	1	1	2	3	4
2	Terwujudnya kualitas produk perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7	7.1	7.15	7.2	7.25

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

## 2.2 Perjanjian Kinerja



Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan Kinerja ini juga tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menyusun penetapan kinerja setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA 2018 disahkan. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2018 antara Bupati dan Kepala Dinas, antara Kepala Dinas dan Eselon III, serta antara Eselon III dan Eselon IV.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan PK Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018.



## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PERDAGANGAN

Komplek Pemda II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul  
Jalan Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, DI. Yogyakarta 55714  
Telp. 0274.367338; Fax. 0274.367504 Website:  
perdagangan.bantulkab.go.id Email:  
dinas.perdagangan@bantulkab.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Ir. Subiyanta Hadi, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. Suharsono**

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, Januari 2018

Pihak Kedua  
Bupati Bantul

Drs. H. Suharsono

Pihak Pertama

Kepala Dinas Perdagangan Kab. Bantul

Ir. Subiyanta Hadi, MM

Lampiran Perjanjian Kinerja OPD

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan  
Tahun Anggaran : 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	1
2	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor	%	4,76
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7,1

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 6.389.715.712
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 994.150.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 100.875.000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 178.750.000
5	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp 2.430.450.000
6	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Rp 1.724.005.000
7	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp 369.000.000
8	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Rp 1.700.875.000
9	Program Pemberdayaan Pedagang	Rp 1.098.125.000
10	Program Penataan Pasar Rakyat	Rp 9.159.665.629
Jumlah		Rp 24.145.611.341

Bantul, Januari 2018

Pihak Kedua  
Bupati Bantul  
  
Drs. SUHARSONO

Pihak Pertama  
Kepala Dinas Perdagangan  
Kabupaten Bantul  
  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PERDAGANGAN  
SUBIYANTA MADI, MM  
Pembina Tk. I/b  
199304011963031000

Tabel 2.7 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan Periode 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	4,76
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	1
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7,10

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatnya ekspor daerah	Pertumbuhan Ekspor	%	7,1	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	1.724.005.000
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	1	Program Pemberdayaan Pedagang Program Penataan Pasar Rakyat	1.098.125.000 9.159.665.629
3	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	%	4,76	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	2.430.450.000 369.000.000 1.700.875.000

Sumber : esakip.bantulkab.go.id



## 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

No.	Sasaran	Program	Anggaran
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	2.430.450.000
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	369.000.000
		Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	1.700.875.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>4.500.325.000</b>
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Program Pemberdayaan Pedagang	1.098.125.000
		Program Penataan Pasar Rakyat	9.159.665.629
		<b>JUMLAH</b>	<b>10.257.790.629</b>
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1,461,363,000
		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	71,400,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>1.532.763.000</b>

Sumber : [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id)

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Gambar 3.1 Planning Process



Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada

tabel 3.1 berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Tabel 3.1

## Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
<b>Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 1 : Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan</b>					
1.	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Kuantitatif	$\frac{\text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n - \text{ tahun } (n - 1)}{\text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n - 1} \times 100\%$	data PDRB bersumber dari BPS Kabupaten Bantul, data yang diambil yakni data pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Recheck data dan perhitungan; konsultasi ke BPS; pemantauan lapangan; entri data ke e-sakip, melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran
<b>Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 2 : Meningkatnya kualitas pasar rakyat</b>					
5.	Jumlah pasar tipe A	Kuantitatif	Jumlah pasar dengan tipe A	Perhitungan/penilaian jumlah pasar tipe A yang kriterianya sesuai dengan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Pasar	Recheck data dan perhitungan; kunjungan ke lapangan; entri data ke e-sakip; melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran
<b>Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekspor</b>					
6.	Pertumbuhan Nilai Ekspor	Kuantitatif	$\frac{\text{nilai ekspor tahun } n - \text{ nilai ekspor tahun } (n - 1)}{\text{nilai ekspor tahun } n - 1} \times 100\%$	Data bersumber dari jumlah SKA (Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY kemudian diolah oleh Dinas Perdagangan Kab. Bantul. SKA adalah surat keterangan kebangsaan suatu barang yang disertakan pada saat barang tersebut memasuki wilayah negara tujuan ekspor tertentu untuk memberitahukan bahwa barang tersebut berasal/diolah dari suatu negara	Recheck data dan perhitungan, konsultasi ke DIY; entri data ke e-sakip, melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran

Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2018, data diolah

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

### 3.1 Capaian Kinerja



Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \text{Realisasi/Rencana} \times 100\%$$

Pencapaian IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara lengkap ditunjukkan oleh tabel berikut ini.



**Tabel 3.4 Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Prosentase	Keterangan
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	%	4.61	Triwulan 1	0	0	0	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). PDRB dalam data ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations. IKU ini menggunakan PDRB menurut lapangan usaha yakni PDRB sub kategori perdagangan. Karena merupakan angka pertumbuhan, maka angka ini dihitung pada akhir tahun. PDRB sub kategori perdagangan pada tahun 2018 sebesar Rp 1.572.066.502.310 rupiah dan tahun 2017 sebesar Rp 1.482.787.138.662 rupiah, sehingga didapat angka pertumbuhan sebesar 6.02%
					Triwulan 2	0	0	0	
					Triwulan 3	0	0	0	
					Triwulan 4	4.76	6.02	126.47	
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	1	Triwulan 1	0	0	0	Pasar Imogiri Kabupaten Bantul berhasil mendapatkan sertifikat berupa pasar ber SNI 8152:2015 dari Badan Standarisasi Nasional. Pasar ber SNI ini tarafnya sudah diatas pasar tipe A. Di Indonesia baru ada 10 pasar yang tersertifikasi SNI. Sertifikat SNI ini berlaku selama 3 tahun.
					Triwulan 2	0	0	0	
					Triwulan 3	0	0	0	
					Triwulan 4	1	1	100	
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7	Triwulan 1	0	0	0	Nilai ekspor pada tahun 2018 sebesar 90.258.679,86 US\$ sedangkan pada tahun 2016 sebesar 79.200.365,60 US\$ sehingga pertumbuhannya sebesar 13.96%. Karena merupakan data pertumbuhan, maka bisa dihitung pada akhir tahun. Komoditas dengan nilai tertinggi adalah tekstil, garment, furniture, dan handicraft. Negara tujuan ekspor antara lain Australia, USA, UK, Japan, Canada, Perancis, Hongkong, Rusia, Italia, dan Singapura
					Triwulan 2	0	0	0	
					Triwulan 3	0	0	0	
					Triwulan 4	7.10	13.96	196.62	

Tabel 3.5 Perbandingan Target Kinerja Tahun(berjalan) dengan Target Akhir RPJMD Dinas Perdagangan Tahun 2018

No	Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran	Capaian/Kondisi 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2021	Capaian 2018 terhadap 2021 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	<b>Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan</b>						
1.1	<i>Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan</i>						
1.1.1	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5.69	4.76	6.02	126.47	5.95	101.18
	Faktor Penghambat : Tergantung dari data BPS						
	Faktor Pendorong : Karena menggunakan data sekunder yang berasal dari BPS, maka data yang digunakan lebih valid karena memakai kaidah statistik						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : Meningkatkan pelayanan dan pengamanan perdagangan; meningkatkan kualitas SDM pedagang; meningkatkan sarpras perdagangan						
1.2	<i>Meningkatnya kualitas pasar rakyat</i>						
1.2.1	Jumlah pasar tipe A	1	1	1	100.00	4.00	25.00
	Faktor Penghambat : Untuk mencapai pasar tipe A, banyak persyaratan yang harus terpenuhi						
	Faktor Pendorong : Syarat untuk mencapai pasar tipe A sesuai dengan <b>Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018</b> sehingga penentuan indikator memiliki dasar hukum						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : Menyiapkan 1 unit pasar yang lain dengan rehabilitasi dan melengkapi sarana prasarana yang diwajibkan untuk pasar tipe A						
2	<b>Terwujudnya kualitas produk perdagangan</b>						
2.1	<i>Meningkatnya pertumbuhan ekspor</i>						
2.1.1	Pertumbuhan Nilai Ekspor	7.09	7.10	13.96	196.62	7.25	192.55
	Faktor Penghambat : data ekspor yang tergantung dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY						
	Faktor Pendorong : Data ekspor yang didapat dari Perindag DIY dicrosscheck ke masing-masing eksportir yang ada di Kabupaten Bantul						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : Meningkatkan nilai ekspor; meningkatkan promosi produk-produk unggulan; pengumpulan data ekspor yang lebih berkualitas						

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

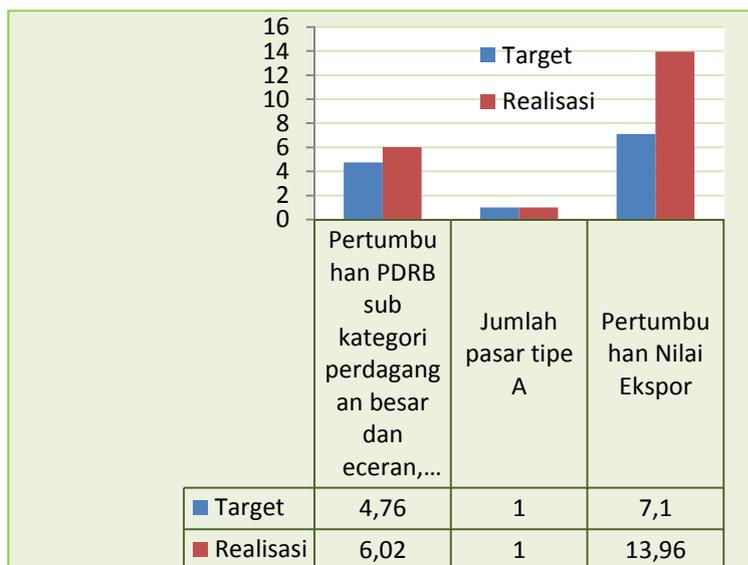


*Sasaran 1.*  
meningkatnya pertumbuhan  
PDRB  
sektor perdagangan

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Evaluasi pada Laporan ini akan

dilakukan perbandingan data sebagai berikut :

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2018;
2. Nilai realisasi tahun 2018 dengan target akhir Renstra;
3. Nilai realisasi tahun 2018 dengan realisasi pada tahun 2017;
4. Nilai realisasi tahun 2018 dengan realisasi 5 tahun terakhir;
5. Faktor penghambat dan faktor pendukung.



Sumber: [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id), diolah

Gambar 3.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018

rencana aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Berikut penjelasan hasil analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 per sasaran.

Sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan diukur melalui indikator Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan. Salah satu cara untuk penghitungan PDRB adalah melalui metode pendekatan produksi. Menurut pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi

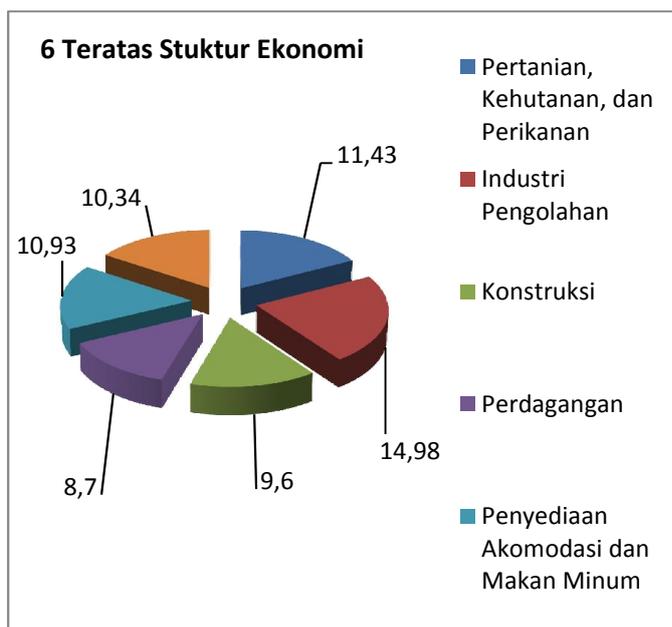
berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

PDRB Bantul menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Perdagangan merupakan salah satu sektor kategori PDRB dari 17 lapangan usaha. Pemecahan menjadi sub kategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB harga atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementara atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Karena dalam hal indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah pertumbuhan PDRB, maka data yang dipakai adalah PDRB atas harga konstan tahun 2010, dengan demikian pertumbuhan sudah bebas dari faktor inflasi.

Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang “*commodity flow approach*”. Marjin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio marjin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang. Kemudian output atau marjin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan (BPS, 2018).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan adalah data output barang dari industri domestik (dari Seksi Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh BPS.



Gambar 3.3 Struktur Ekonomi Bantul

*Sektor Perdagangan merupakan kategori yang cukup potensial berkembang di wilayah Bantul. Pada tahun 2018 kategori ini menyumbang PDRB Bantul sebesar 8,7 persen terbesar ke 6 setelah kategori Konstruksi.*

Pada gambar dapat dilihat bahwa ada 6 kategori struktur ekonomi Bantul teratas, dimana andil tertinggi dicapai oleh Kategori industri pengolahan (14,98%), kemudian diikuti oleh kategori pertanian,kehutanan dan perikanan (11,43%), penyediaan akomodasi makan minum (10,93%),

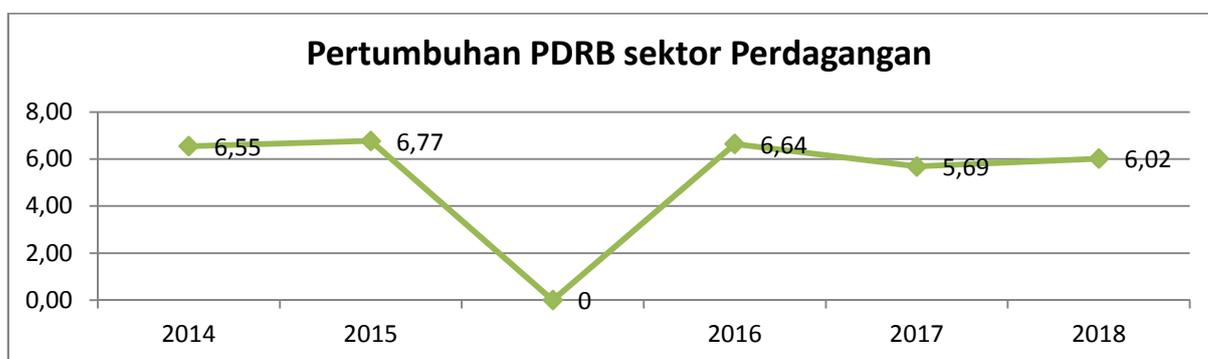
kategori konstruksi (9,6%), dan perdagangan di peringkat keenam dengan andil sebesar 8,7%, dari total 17 kategori.

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%)	5,69	4,76	6,02	126,47	5,95	101,18

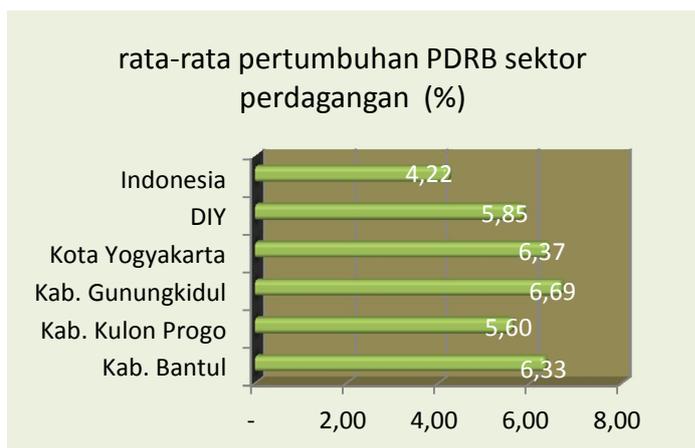
Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah sebesar 4,76%, realisasi sebesar 6,02%, tercapai 126,47% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 5,69% maka capaian tahun 2018 naik sebesar 0,33%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 5,95%, dengan demikian capaian tahun 2018 ini telah menyumbang 101,18% dari target akhir Renstra tahun 2021.



Gambar 3.4 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2014-2018, diolah



Gambar 3.5 Rata-rata pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

Perekonomian Bantul di sektor perdagangan mengalami rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 6,33 persen secara riil selama periode 2014-2018. Meskipun tidak seoptimis tahun 2012 yang mencapai 8,92 persen (Gambar 3.4). Namun demikian sub sektor

perdagangan di Bantul menunjukkan kondisi yang semakin membaik dimana pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan mengalami pertumbuhan yang positif dan stabil. Hal ini seiring dengan membaiknya perekonomian global, peningkatan produksi, serta meningkatnya daya beli masyarakat.

Berikut ditampilkan data pertumbuhan PDRB sektor perdagangan kabupaten lain, DIY, dan Indonesia. Namun karena data tahun 2018 belum tersedia, sehingga yang ditampilkan adalah angka rata-rata pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dari tahun 2012 -2016 (5 tahun terakhir).

Daerah	2014	2015	2016	2017	2018	Rata2/thn
Kab. Bantul	6,55	6,77	6,53	5,69	6,02	6,33
Kab. Kulon Progo	5,22	6,52	6,20	8,46		5,60
Kab. Gunungkidul	6,77	6,89	6,96	6,12		6,69
Kota Yogyakarta	5,28	5,99	5,54	5,24		6,37
DIY	5,69	6,19	6,09	5,72	5,54	5,85
Indonesia	5,18	2,54	4,03	4,38	4,99	4,22

Sumber: bps.go.id, 2018, diolah

Dari gambar dan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB kategori perdagangan selama tahun 2014-2018, Kabupaten Gunungkidul berada pada urutan pertama dengan angka rata-rata sebesar 6,69 persen, diikuti dengan Kabupaten Kulon Progo, kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, DIY dan di Indonesia dengan nilai rata-rata secara berurutan 6,60; 6,37; 6,33; 5,85; dan terakhir 4,22.

Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan ini juga didukung dari program yang dilaksanakan pada tahun 2018 yakni:

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
3. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

## a. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Indikator Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/tera ulang	%	7	44.14	630.57

Sumber: [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id)

Indikator program ini adalah cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/tera ulang. Selama tahun 2018, cakupan alat UTTP yang telah ditera/tera ulang terealisasi sebesar 44,14 persen dari target sebesar 7 persen, sehingga prosentase capaian indikator program ini tercapai 630,57 persen. Data ini setara dengan bahwa alat UTTP yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang pada tahun 2018 adalah sebanyak 95.529 unit dari target sebanyak 216.381 unit.

Program Perlindungan Konsumen dan dan Pengamanan Perdagangan ini dilaksanakan dalam upaya untuk melindungi konsumen dan ketersediaan kebutuhan pokok barang strategis pada masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.408.427.000,- terealisasi Rp2.073.074.605,- (86,76). Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Kegiatan Pelayanan Kemetrollogian Daerah. Anggaran yang tidak terserap



Gambar 3.6 Pengendalian BBM

merupakan sisa tender pengadaan peralatan metrologi dan kendaraan roda 4

Pentingnya mensosialisasikan kepada masyarakat agar tertib ukur baik dalam hal kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan/upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Peningkatan pelayanan alat UTTP yang ditera/tera ulang dan

sosialisasi untuk menyampaikan pentingnya tertib ukur merupakan tugas bagi Pemerintah Daerah, dan perlunya didukung dengan peralatan standar yang memadai, SDM yang berkompeten, Kendaraan operasional yang mendukung mobilitas dan pelayanan prima serta peralatan pendukung yang memadai.

## b. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Indikator Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase deviasi harga komoditas strategis ( deviasi yang ditargetkan <5%)	%	5	2.61	147.8

Capaian indikator program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri adalah persentase deviasi harga komoditas strategis (deviasi harga yang ditargetkan adalah dibawah 5 persen). Data deviasi harga adalah data inflasi Kabupaten Bantul yang bersumber dari BPS Kabupaten Bantul. Pada tahun 2018 angka deviasi harga komoditas strategis adalah sebesar 2,61 persen, yang artinya perbedaan harga komoditas tahun 2018 naik sebesar 2,61 persen dibanding harga pada tahun 2017. Deviasi harga ini dibawah 10 persen sehingga masuk dalam kategori inflasi ringan (normal).

Apabila inflasi itu ringan → mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Apabila inflasi yang parah, saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi) → keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu.

Pendorong Inflasi 2018:

- Penyesuaian Tarif Dasar Listrik
- Kenaikan tinggi beberapa jenis bahan makanan seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, sayur-sayuran.
- Bulan Puasa dan Hari Raya → berpengaruh pada inflasi bulan tersebut
- Kenaikan harga BBM
- Kelangkaan bahan bakar rumah tangga

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Berdasarkan keparahannya inflasi dapat dibedakan :

- **Inflasi ringan** (kurang dari 10% / tahun)
- **Inflasi sedang** (antara 10% sampai 30% / tahun)
- **Inflasi berat** (antara 30% sampai 100% / tahun)
- **Hiperinflasi** (lebih dari 100% / tahun)

Indikator untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK diartikan sebagai ukuran perubahan harga yang diperoleh dengan membandingkan dari

waktu ke waktu biaya yang dikeluarkan untuk paket yang tetap dari komoditas yang ditentukan oleh pembelian konsumen di perkotaan.

Pengumpulan data harga konsumen diperoleh dari hasil wawancara langsung ke pedagang. Wawancara tersebut dilakukan oleh baik pihak BPS maupun dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Seluruh jenis barang dan jasa dikelompokkan ke dalam beberapa daftar isian sesuai dari gejolak harga. Data harga yang dicatat merupakan harga transaksi (bukan penawaran pedagang). Pengumpulan data harga konsumen dilaksanakan di pasar tradisional/rakyat dan pasar modern.

#### Metode Pendataan 1

Jenis Daftar Isian	Jenis Komoditas	Frekwensi Pencacahan	Hari Pencacahan
(1)	(2)	(3)	(4)
HK-1.1	Beras, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur, susu bubuk, susu bayi, susu balita, susu kental manis, tahu, tempe, bawang ,cabe, minyak goreng, gula pasir,semen, dan emas perhiasan	Mingguan	Senin dan Selasa
HK-1.2	Mi instan, sosis, nugget, ikan segar, kacang hijau, kacang tanah, garam, kelapa, sabun cuci, bahan celana dan baju, batik, dan lain-lain	2 Mingguan	Rabu dan Kamis dalam minggu 1 & Minggu III

#### Metode Pendataan 2

Jenis Daftar Isian	Jenis Komoditas	Frekwensi Pencacahan	Hari Pencacahan
(1)	(2)	(3)	(4)
HK-2.1	Bihun, tepung beras, daging dalam kaleng, susu wanita hamil, susu rendah lemak, susu cair kemasan, gula merah, kecap, bumbu-bumbuan, margarin, ayam goreng, biskuit, kembang gula, minuman ringan, rokok, kopi bubuk, dan lain-lain.	Bulanan	Mulai hari Selasa yang terdekat dengan tanggal 15, sampai dengan hari Kamis
HK-2.2	Pembasmi nyamuk bakar, pembasmi nyamuk cair, pembersih lantai, penyegar ruangan, baju kaos/T-shirt, celana dalam pria, celana panjang jeans, celana dalam wanita, jamu, obat-obatan, pasta gigi, dan lain-lain	Bulanan	Awal bulan tanggal 5 s/d 15

### Metode Pendataan 3

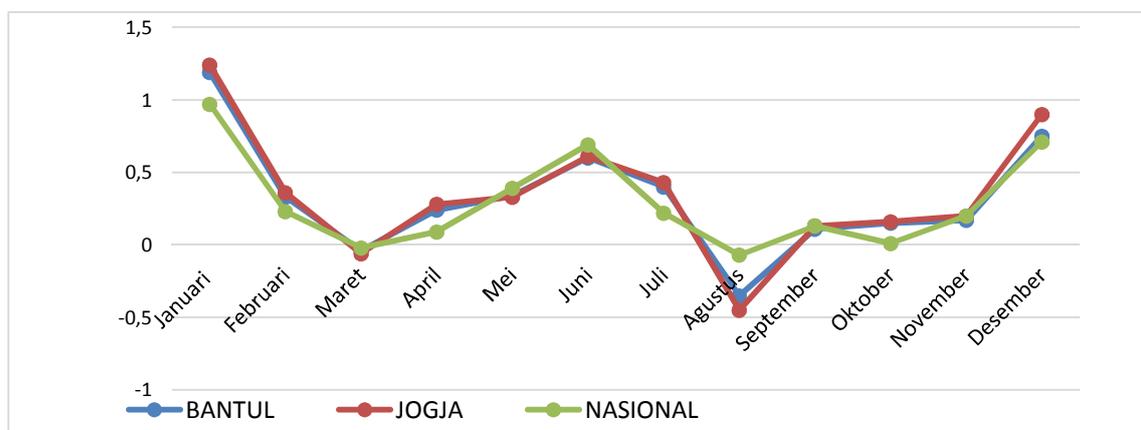
Jenis Daftar Isian	Jenis Komoditas	Frekwensi Pencacahan	Hari Pencacahan
(1)	(2)	(3)	(4)
HK-3	Bahan bangunan, gas elpiji, gelas, kasur, kompor gas, lemari pakaian, setrika, pompa air listrik, jam tangan, TV berwarna, bensin, mobil, sepeda motor, tarif angkutan, HP, jasa keuangan, dan lain-lain	Bulanan	Awal bulan tanggal 1 s/d 10
HKT	Digunakan juga beberapa jenis daftar isian untuk melakukan pencatatan harga, seperti jasa kesehatan, sewa rumah, dan lain-lain		

Tabel 3.10 Tingkat Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2018

Daerah	Inflasi Tahun 2018
<b>Bantul</b>	2.61
<b>Jogja</b>	2.66
<b>Nasional</b>	3.13

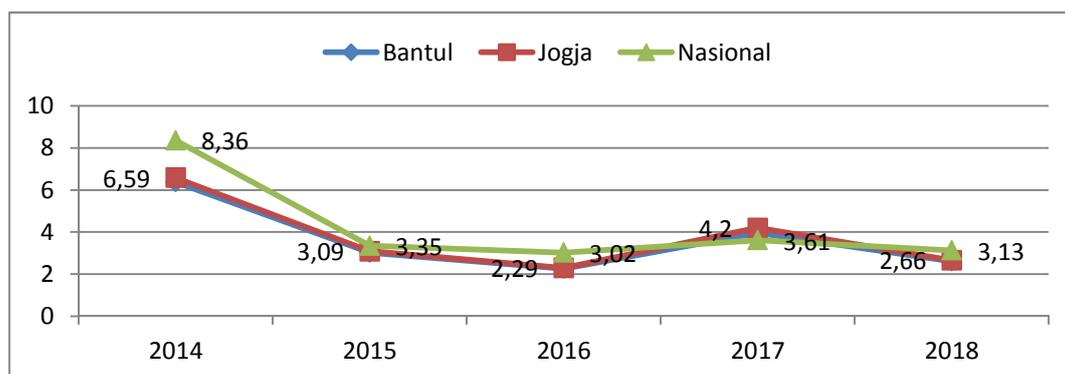
Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2018

Tabel 3.11 Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2018



Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2018

Tabel 3.12 Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2014-2018



Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2018

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp419.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp 408.041.650,- (97,34%). Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini meliputi:

### **Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk**

Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan serta menjaga stabilitas harga dan stok bahan pokok di Kabupaten Bantul. Kegiatan mengambil lokasi di Pasar rakyat dan distributor bahan pokok di Kabupaten Bantul.

#### **a) Operasi Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok Strategis**

Operasi Pasar Murah (OPM) adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok strategis untuk melindungi masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Bantul. Adapun kegiatan OPM dilaksanakan di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, dengan sasaran kegiatan adalah masyarakat di sekitar Komplek Dinas Pemda II Kabupaten Bantul. Kegiatan OPM dilakukan 5 (lima) kali dalam setahun, yaitu 4 (empat) kali pada bulan ramadhan (menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H), serta 1 (satu) kali menjelang Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Dalam kegiatan Operasi Pasar Murah, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan beberapa instansi terkait dan distributor bahan pokok di wilayah Kabupaten Bantul, seperti BULOG, Pertani, PPI, SRG, Wilmar, Distributor Telur (Ibu Mukarno), Distributor Bawang Merah (Ibu Sulami).



**b) Monitoring Evaluasi Lapangan**

Monitoring Evaluasi Lapangan (Monev) merupakan kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan harga dan stok bahan pokok strategis dari tingkat distributor agar tercipta stabilitas harga dipasaran. Kegiatan monev dilakukan secara berkala di 17 (Tujuh Belas) Kecamatan di Kabupaten Bantul. Adapun sasaran kegiatan ini adalah gudang dan distributor bahan pokok strategis.



c) **Kajian Pemetaan Toko Modern, Pasar Tradisional, Agen LPG, Pangkalan LPG, dan Gudang Kebutuhan Pokok Strategis.**

Kajian Pemetaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, selain itu kegiatan ini bertujuan untuk update data pelaku usaha yang ada dikawasan Kabupaten Bantul. Kajian tersebut mencakup toko modern, pasar tradisional, agen dan pangkalan LPG, dan kebutuhan pokok strategis.

Kegiatan pemetaan bekerjasama dengan pihak ketiga, tetapi dalam pelaksanaannya juga melibatkan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Dari hasil kajian ini didapatkan jumlah toko modern sebanyak 200 toko, 33 pasar tradisional dan 27 pasar desa, 11 agen LPG serta 1022 pangkalan LPG di Kabupaten Bantul.



**Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang**

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengoptimalkan pengelolaan gudang dengan Sistem Resi Gudang. Lokasi kegiatan di Kabupaten Bantul. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Gedung dan Sistem Resi Gudang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan gudang dan Sistem Resi Gudang. Kegiatan ditujukan untuk petani - petani di kabupaten Bantul yang

tergabung dalam Gapoktan – Gapoktan untuk meresikan hasil panen di Sistem Resi Gudang. Untuk terwujudnya kegiatan ini dilakukan dengan mensosialisasikan kepada petani – petani yang ada di bantu apa itu Sistem Resi Gudang dan apa keuntungan jika meresikan hasil panen di Sistem Resi Gudang. Dalam kegiatan sosialisasi juga dihadirkan dari bank yang diharapkan untuk bisa membantu dan atau bekerja sama dengan para petani dalam bidang pendanaan berupa pinjaman modal. Selain melakukan sosialisasi dalam kegiatan pengembangan pengelolaan Gudang dan Sistem Resi Gudang juga dibuat billboard sebagai papan informasi atau iklan yang ditujukan untuk masyarakat sebagai petani agar tertarik untuk meresikan hasil panen di Sistem Resi Gudang. Pengelola Sistem Resi Gudang dalam hal ini dilimpahkan ke pihak ketiga



### **Pelayanan Pengamanan Perdagangan**

Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok strategis yang meliputi komoditas pangan strategis, BBM bersubsidi, LPG, dan pupuk. Kegiatan ini berupa pelaksanaan pengawasan terhadap toko, pasar dan kios untuk memantau harga setiap hari, ijin, dan jenis dagangan. Melalui kegiatan ini diharapkan distribusi dan harga barang dapat terkendali demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari barang konsumsi yang membahayakan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, barang kebutuhan pokok diklasifikasikan sebagai berikut :



Untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan stok dan perlindungan konsumen dilaksanakan pengawasan terpadu bersama dengan POLRES, KODIM, Dinas Perdagangan, Satpol PP dan dinas terkait lainnya yang meliputi :

1. Pengawasan dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok strategis
2. Pengawasan dan pemantauan LPG 3 kg
3. Pengawasan dan pemantauan BBM (Pertamini)
4. Pengawasan dan pemantauan Bahan Berbahaya (B2)
5. Pengawasan dan pemantauan Pupuk Bersubsidi
6. Pengawasan dan pemantauan Gudang, Toko Modern dan Toko Kelontong



Adapun sasaran kegiatan adalah pasar yang merupakan tumpuan atau tempat masyarakat Bantul khususnya dalam mendapatkan bahan pokok. Tidak hanya itu, di toko – toko modern juga dilakukan pengecekan, karena tidak bisa dipungkiri toko – toko modern mulai menjamur dan tidak sedikit masyarakat mulai membeli bahan – bahan pokok disana. Pengawasan juga dilakukan di level

distributor, karena bisa saja dari level distributor makanan sudah tidak layak dikonsumsi dimungkinkan dari segi penyimpanan. Selain segi bahan pokok dan bahan makanan pengawasan juga dilakukan di sektor LPG untuk menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan dari agen ke pangkalan dan penjual. Untuk sektor pertanian, penjualan pupuk subsidi tidak lepas dari pengawasan, agar bisa tepat sasaran. Dalam kegiatan pengawasan dilakukan oleh tim pengawas perdagangan yang beranggotakan oleh dinas perdagangan Kabupaten Bantul dan instansi – instansi terkait.

*Sasaran 2.*  
meningkatnya kualitas pasar rakyat

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian nasional, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana pelestarian budaya setempat.

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pasar tradisional telah berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat, dengan tetap memperhatikan kekhususan pasar rakyat terkait aspek lokasi yang bersifat tetap berupa toko/kios/los dan bentuk lainnya serta menjadi tempat jual beli dengan proses tawar menawar.

Tabel 3.13 Jumlah dan Jenis Pasar di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2018

No.	Jenis Pasar	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2018
1	Pasar Desa (unit)*	29	33	33	34	34
2	Pasar Kabupaten (unit)**	31	31	32	32	32

\*pasar desa dibawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

\*\* pasar kabupaten dibawah naungan Dinas Perdagangan Kab. Bantul

Sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat diukur melalui indikator jumlah pasar rakyat tipe A. Kategori pasar rakyat tipe A didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/M\_DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Dalam peraturan tersebut diuraikan kriteria pasar tradisional tipe A yaitu:

- a. Luas lahan minimal 3.000 m<sup>2</sup>
- b. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- c. Peruntukan lahan sesuai dengan RTRW daerah setempat;

- d. Jumlah pedagang minimal 150 pedagang
- e. Bangunan utama berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
  - 1. Kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
  - 2. Ruang serbaguna untuk pembinaan pedagan, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m<sup>2</sup>
  - 3. Toilet/wc
  - 4. Tempat ibadah
  - 5. Pos ukur ulang (minimal 2x2 m)
  - 6. Pos kesehatan
  - 7. Pos keamanan
  - 8. Drainase (ditutup dengan grill)
  - 9. Tempat penampungan sampah sementara
  - 10. Gedung tempat penyimpanan stok barang
  - 11. Area bongkar muat;
  - 12. Tempat parkir
  - 13. Area penghijauan
  - 14. Hidran/alat pemadam kebakaran
  - 15. Instalasi air bersih dan jaringan listrik;
  - 16. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
  - 17. Telekomunikasi
  - 18. Sistem informasi harga dan stok
  - 19. Papan pengumuman informasi harga harian
- f. Jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum
- g. Pasar dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar
- h. Operasional pasar dilakukan setiap hari
- i. CCTV yang terhubung secara online untuk memantau aktifitas perdagangan

Dari sekian banyak kriteria, untuk kriteria luas, jumlah pedagang, dan operasional pasar sebenarnya sudah dipenuhi oleh 4 pasar besar yakni pasar Imogiri, pasar Bantul, pasar Niten, dan Pasar Piyungan. Namun hanya satu pasar yang telah memenuhi semua kriteria pasar tipe A yaitu Pasar Imogiri. Dengan demikian target pasar tipe A sebanyak 1 unit pada tahun 2017 dan 2018 tercapai 100 persen. Pada tahun 2018 fokus pada pemenuhan untuk calon pasar tipe A yang ke-2, sehingga pada tahun 2018 target pasar tipe A sama dengan target tahun 2017. Diharapkan pada akhir tahun Renstra (2021) 3 pasar

lainnya dapat memenuhi semua kriteria pasar tipe A sehingga pasar tipe A sebanyak 4 unit pada akhir tahun 2021 tercapai.

Tabel 3.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah pasar tipe A (unit)	-	1	1	100	4	25

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Pasar Imogiri pada tahun 2017 lolos mendapatkan sertifikat pasar ber SNI dari Badan Standarisasi Nasional. Standarisasi tersebut tertuang dalam SNI 8152:2015. Sertifikat ini berlaku selama 3 tahun. Pasar Imogiri telah melakukan perbaikan dan perubahan ke arah yang jauh lebih baik dari waktu ke waktu sehingga amat layak jika Pasar Imogiri ini mendapat predikat SNI dengan nilai 100 (sempurna).



Dari seluruh pasar di Indonesia, baru 10 pasar yang sudah tersertifikasi SNI. Delapan pasar berada di DKI Jakarta, satu pasar di kawasan Depok, dan satu pasar di Temanggung.



Gambar 3.7  
Kepala Dinas Kabupaten Bantul menerima sertifikat pasar ber-SNI



Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Pembayun bersilaturahmi dan bertemu dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APPSI, Sandiaga Uno bertempat di GOR Ciracas pada Rabu, 24 Januari 2017. Ketua DPW APPSI DIY menyampaikan perihal kegiatan-kegiatan yang menyangkut peningkatan sarana dan prasarana di Pasar Imogiri dalam upaya dan perjuangannya menuju pasar rakyat ber-SNI dengan peraih nilai 100



Ada beberapa persyaratan sebuah pasar bisa ber-SNI. Antara lain persyaratan teknis yang meliputi ukuran luas ruang dagang, area

parkir, zonasi, area bongkar muat barang, toilet, ruang menyusui, penerapan manajemen yang baik, pedagang tertata atau sistem zonasi, sistem keamanan, fasilitas tera, ramah bagi penyandang disabilitas, dan lain sebagainya.

Kabupaten Bantul patut berbangga menyusul keberhasilan Pasar Imogiri dalam mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2015. Sertifikasi ini diperoleh dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN). Dengan demikian Pasar Imogiri di Bantul ini menjadi satu-satunya pasar rakyat ber-SNI di wilayah DIY.

Capaian sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat ini didukung oleh program:

1. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2. Program Pemberdayaan Pedagang
3. Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pedesaan

### Program Pemberdayaan Pedagang

Tabel 3.15 Pengukuran Kinerja Program Pemberdayaan Pedagang

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Program Pemberdayaan Pedagang	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	%	4.2	-11.95	-271,59

Sumber: [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id)

Indikator program pemberdayaan pedagang ini adalah pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat. Pengambilan data diperoleh dari hasil survey omzet pedagang pasar rakyat dengan sasaran pedagang pasar Bantul, Pasar Imogiri, pasar Panasan, dan pasar Mangiran dengan komoditas bahan makanan, bahan makanan segar, toiletries, sandang, peralatan dapur, dan lainnya. Rumus indikator program ini adalah  $(\text{jumlah omzet pedagang pasar rakyat tahun 2018} - \text{jumlah omzet pasar tahun 2017}) / (\text{jumlah omzet pedagang tahun 2017}) \times 100\%$ . Dari target pertumbuhan sebesar 4,2 persen, ternyata pada tahun 2018 terjadi penurunan omzet pedagang sebesar 11,95% dibanding omzet tahun 2017. Adanya penurunan omzet pada hampir semua komoditas di 4 pasar rakyat ini faktor utamanya adalah kurangnya minat masyarakat untuk berbelanja ke pasar dan menjamurnya toko modern. Secara teknis, di pasar Imogiri lebih disebabkan karena penataan zonasi komoditas pasar, pada pasar Bantul dikarenakan efek sementara dari adanya pembangunan pasar dan penempatan ulang pedagang. Pada pasar Mangiran, penurunan omzet disebabkan karena berkurangnya jumlah pengunjung pasar. Pada pasar Panasan, penurunan omzet pedagang disebabkan oleh penataan pasar yang kurang sesuai.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan SDM, Kelembagaan, dan Promosi Pasar dengan anggaran Rp906.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp 889.399.500,- (98,09). Kegiatan ini dilaksanakan antara lain untuk penguatan kelembagaan melalui fasilitasi kepada Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul dan dimaksudkan agar organisasi ini menjadi lebih kuat dan mandiri, sehingga bisa menjadi pengayom dan perekat ikatan kekeluargaan sesama pedagang pasar, diwujudkan dalam bentuk fasilitasi, rapat koordinasi dan pendampingan organisasi demi keselarasan APPSI dan Dinas Perdagangan.



Pada Tahun ini bentuk promosi pasar rakyat adalah pagelaran wayang di 10 titik pasar yang bertujuan untuk mempromosikan pasar. Dengan pemilihan dalang yang variatif diharapkan dapat menarik massa untuk menikmati pagelaran wayang yang pada akhirnya dapat memperkenalkan pasar rakyat pada masyarakat umum.



Pemasangan Baliho di beberapa titik pasar juga bertujuan untuk mempromosikan pasar rakyat

Peningkatan kemampuan pedagang pasar dalam mengelola usaha dan mengelola keuangan atas usaha yang dijalankannya dilakukan melalui pelatihan. Pelatihan pedagang pasar ini dilaksanakan bekerjasama dengan pakar kewirausahaan dari perguruan tinggi (UGM), terdiri dari 13 kali pelatihan dengan peserta masing-masing 40 orang.



Gambar 3.8 Jumlah Pedagang Pasar Rakyat Tahun 2014-2018

Permodalan yang terbatas merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat/tradisional khususnya pedagang. Hal ini memberikan dampak terhadap munculnya rentenir yang menjanjikan pinjaman uang dengan banyak kemudahan, namun dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Bantul secara berkelanjutan telah mengantisipasi melalui pelaksanaan pinjaman dana bergulir dengan bunga lunak tanpa agunan bagi para pedagang pasar dalam rangka penguatan modal usaha. Dana bergulir ini sudah menjangkau di 23 pasar rakyat dengan akumulasi modal sebesar Rp7.000.300.000,00 dan telah memberikan kontribusi pendapatan jasa sebesar Rp141.200.000,- Namun demikian, pinjaman ini baru menjangkau sebanyak 3.354 pedagang (28,44%) dari seluruh pedagang pasar se-Kabupaten Bantul yang berjumlah 13.350 orang, sehingga ke depan program tersebut dapat ditingkatkan agar akses pedagang untuk mendapatkan penguatan modal lebih terbuka dan banyak untuk meningkatkan kemandirian usaha.

### Program Penataan Pasar Rakyat

Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja Program Penataan Pasar Rakyat

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Program Penataan Pasar Rakyat	cakupan jumlah kondisi pasar baik	%	69.7	78.12	112.09

Sumber: [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id)

Indikator program penataan pasar rakyat ini adalah cakupan jumlah kondisi pasar baik. Persentase pasar baik sampai tahun 2018 sebesar 78,12 persen atau prosentase capaian terhadap target sebesar 112,09 persen.

Persentase pasar baik ini merupakan jumlah pasar dengan kondisi baik dibagi dengan jumlah pasar kabupaten (32 pasar) x 100%. dari total 32 pasar, ada 7 pasar yang belum

dengan kondisi baik, yakni pasar Mangiran, Pundong, Turi, Gumulan, Sangkeh, Gatak, dan Barongan. Meskipun pada tahun 2018 ini pasar Turi, pasar Gumulan, dan pasar Gatak mendapatkan anggaran revitalisasi melalui DAK, namun anggaran tersebut hanya bisa merevitalisasi sebagian kecil kerusakan pasar sehingga belum mampu merevitalisasi pasar secara keseluruhan.

Sampai dengan akhir tahun 2018 di Kabupaten Bantul terdapat 25 pasar yang kondisinya sudah baik, data tersebut disajikan pada Tabel 3.17:

Tabel 3.17 Data Pasar Kondisi Baik Tahun 2018 Di Kabupaten Bantul

NO.	NAMA PASAR	LUAS TANAH	KEPEMILIKAN	JUMLAH PEDAGANG
1	Bantul	27714	pemda	1,565
2	Niten	32,635	Kas Desa	926
3	Klitikan Niten	4,000	Kas Desa	167
4	Janten	1,000	pemda	79
5	Piyungan	23,500	Pemda	1,015
6	Imogiri	48,000	Kas Desa	1,587
7	Angkruksari	20,035	Kas Desa	513
8	Pijenan/Gesikan	15,000	Pemda	258
9	Hw.Pandak	1,888	SG	73
10	Pundong	6,085	Kas Desa	500
11	Jejeran	4,000	SG	711
12	Pleret	6,150	SG	421
13	Hw.Imogiri	12,000	Kas Desa	120
14	Sorobayan	20,315	Kas Desa	290
15	Semampir	2,890	SG	180
16	Sungapan	967	SG	118
17	Turi	8,050	Kas Desa	774
18	Celep	1,409	SG	121
19	Panasan	4,235	Kas Desa	231
20	Dlingo	40,000	Kas Desa	180
21	Ngipik	5,000	Pemda	167
22	Koripan	532	SG	53
23	Jragan	573	SG	47
24	Unggas Bantul	725	SG	166
25	Pasar Seni Gabusan		Kas Desa	79

Sumber Data: Dinas Perdagangan, 2018

Program ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp9.757.550.629,- terealisasi Rp9.521.039.131,- (97,58%) dalam rangka peningkatan kualitas pasar tradisional/rakyat sebagai bagian dari percepatan peningkatan perekonomian daerah. Keluaran yang dihasilkan adalah pembangunan Pasar Bantul. Anggaran tersebut termasuk didalamnya adalah anggaran DAK Penugasan Bidang Pasar untuk revitalisasi pasar rakyat di 5 pasar yakni Pasar Gumulan, Pasar Turi, Pasar Jodog, Pasar Gatak, dan Pasar Bendosari dengan total anggaran DAK sebesar Rp 5.735.449.000,- (*Lima milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*). Pembangunan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pasar rakyat/tradisional di Kabupaten Bantul.

Tantangan yang dihadapi oleh pasar tradisional adalah tumbuhnya mini market/toko modern, bertambahnya jumlah pedagang dari waktu ke waktu, dan masih banyaknya para pemilik modal swasta (rentenir) yang beroperasi di pasar.



Los Pasar yang direhab pada TA 2018

*Sasaran 3.*  
Meningkatnya pertumbuhan ekspor

Indikator sasaran meningkatnya pertumbuhan ekspor adalah pertumbuhan nilai ekspor. Capaian indikator kinerja pertumbuhan nilai ekspor yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah sebesar 7,10%, realisasi sebesar 13,96%, kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 7,09% maka capaian tahun 2018 naik sebesar

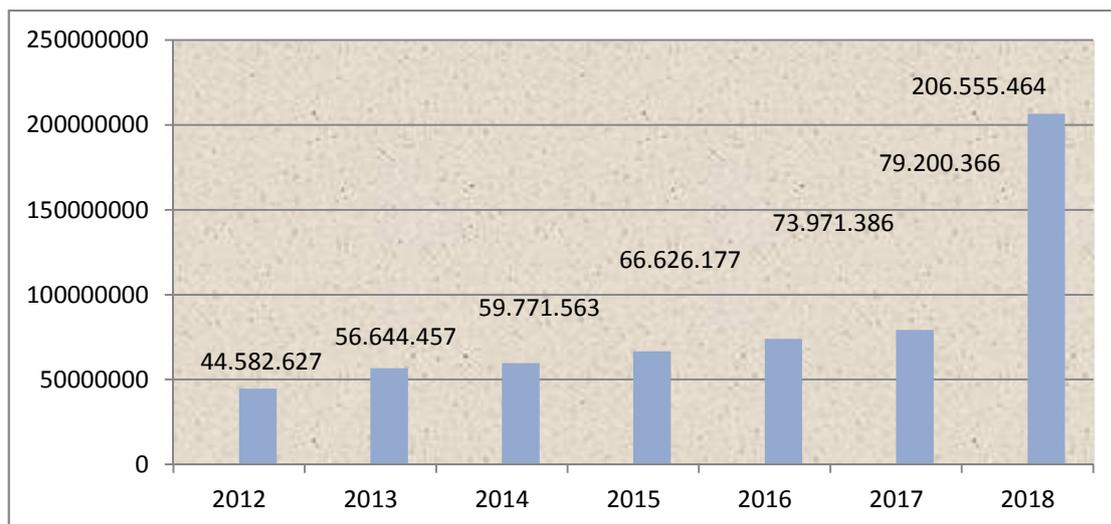
6,87%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 7,25%, dengan demikian capaian tahun 2018 ini telah menyumbang 192.55% dari target akhir Renstra tahun 2021.

*Tabel 3.18 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran*

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan nilai ekspor	7,09	7.10	13.96	196,62	7,25	192.55

Sumber: *esakip.bantulkab.go.id*

Peningkatan ekspor didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti sarung tangan, tekstil, furniture, dan handycraft, sedangkan negara tujuan ekspor utama adalah Australia, USA, Jepang, Perancis, Hongkong, Rusia, Italia, dan Singapura. Selain itu peningkatan nilai ekspor diduga disebabkan oleh penguatan dolar. Perkembangan ekspor Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 3.9. Perkembangan Ekspor 2014-2018**

Salah satu kegiatan perdagangan di Kabupaten Bantul adalah dengan mengembangkan pemasaran dengan promosi produk melalui pameran yang berlangsung setiap tahun, sehingga mampu mendukung pengembangan pangsa pasar dan secara makro

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Volume ekspor	7.689.301,62	7.871.678,60	9.642.793,22	10.168.084,06	15.828.755,06
2	Nilai ekspor (US\$)	59.771.562,69	66.626.177,34	73.971.386,12	79.200.365,60	206.555.464
3	Jumlah Negara	43	43	42	44	45
4	Macam komoditi	35	36	36	25	43

mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul.

**Tabel 3.18 Capaian Kinerja Ekspor Tahun 2014-2018**

Sumber: Dinas Perdagangan, 2014-2018, diolah

Berdasarkan tabel dan gambar perkembangan ekspor Kabupaten Bantul pada tahun 2014-2018 terjadi kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 nilai ekspor sebanyak 206.555.464 US\$, jumlah komoditi yang diekspor sebanyak 43 komoditi, serta terdapat 44 negara tujuan ekspor.

**Tabel 3.19 Pengukuran Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah nilai ekspor	US \$	75,180,000	206.555.464	120.06

Sumber: [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekspor produk UKM Kabupaten Bantul dengan cara memberikan fasilitasi pameran produk dan peningkatan SDM melalui pelatihan. Dilaksanakan dengan dana sebesar 1.831.159.950,-, dan realisasi sebesar Rp 1.783.750.300,- (97,41%). Adapun kegiatan dari program ini ada 2 kegiatan yakni kegiatan Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah dan Pengembangan Ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha.

### **Pengembangan Ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha**

Kegiatan ini berupa sosialisasi Ijin Usaha Bidang perdagangan dilaksanakan menjadi 4 kloter diikuti oleh 120 orang pemilik toko modern di Kabupaten Bantul. Sosialisasi ini dilaksanakan 4 kloter dilaksanakan pada tanggal 14,15,21,22 Maret 2018 dilaksanakan di Rumah Makan Parangtritis, Timbulharjo, Sewon, Bantul dengan Narasumber terdiri dari Dinas PMPT Kab. Bantul, Kejaksaan Negeri Kab.Bantul, Satpol PP Kab. Bantul dan Dinas Perdagangan Kab. Bantul. Sosialisasi ini dilaksanakan bagi para pelaku usaha di Kabupaten Bantul yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Publikasi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul melalui tiga Sosial Media ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi dan berkomunikasi secara interaktif kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Karakteristik yang dimiliki oleh media sosial berbeda dengan massa tradisional. Dengan tingkat keterjangkauan yang besar serta tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Media sosial memiliki banyak kelebihan. Kelebihan ini sebagian karena karakteristik media sosial sebagai media yang berada dalam ruang digital. Tujuan Publikasi ini memberikan informasi secara berkala kepada pengguna sosial media (Facebook, twitter, instagram) di seluruh Indonesia, berbagai agenda kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, produk sosialisasi dan informasi yang diunggah dengan mengangkat topik yang dibahas di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Dengan adanya Media Sosial, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul bisa lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga tidak ada lagi sekat antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga tidak ada lagi sekat antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga tidak ada lagi sekat antara masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut memicu kesadaran masyarakat bahwa kemajuan daerah merupakan tanggung jawab bersama

Melalui Media Sosial, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul bisa mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam memajukan daerah dengan menambah pendapatan daerah. Memberi pemahaman tentang keuangan daerah, pajak, dan redistribusi daerah yang selama ini masih kurang diperhatikan. Diharapkan dengan adanya publikasi melalui sosial media, masyarakat bisa ikut serta dalam memajukan daerah dengan menambah pendapatan daerah melalui redistribusi, pajak, lain sebagainya

### **Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah**

Salah satu cara untuk memperluas jaringan pemasaran produk UMKM dan meningkatkan pendapatan melalui ekspor adalah memberikan bekal pelatihan kepada UKM/Pelaku Usaha yang berpotensi untuk melakukan ekspor. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan pelatihan Manajemen Perdagangan Luar Negeri (MPLN) dengan peserta sebanyak 30 orang yang dilaksanakan di PT. Terminal Peti Kemas Surabaya, Pelatihan Kemasan dengan peserta pelaku usaha agar menambah daya tariki produk yang dipasarkan

dengan peserta 60 orang, dilanjutkan dengan Pelatihan Pemasaran dan Distribusi terhadap 30 pengrajin/pelaku usaha, serta Pelatihan Pemasaran Online dengan peserta 30 orang pelaku usaha yang ingin mengembangkan usaha di pasar global.

Selain Pelatihan, kegiatan ini juga memperkenalkan hasil-hasil produk unggulan Kabupaten Bantul melalui berbagai pameran yang berskala nasional. Kegiatan ini juga sebagai sarana untuk mempertemukan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bantul dengan para pembeli (buyer) yang ada di manca negara. Dari kegiatan ini diharapkan akan banyak pelaku usaha dari Kabupaten Bantul yang melakukan ekspor dan dapat meningkatkan penjualan secara berkelanjutan dengan buyer dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kegiatan ini telah terlaksana enam pameran di dalam negeri meliputi :

### 1. Pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX)



Pameran dilaksanakan setiap tahun sekali pada tanggal 09-12 MARET 2018 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Pameran yang bertema furniture ini diikuti peserta dari Kabupaten Bantul berjumlah 4 orang pengrajin. Dalam pelaksanaan pameran ini telah menghasilkan omset sebesar Rp. 29.500.000,-.

### 2. Pameran Jogja International Furniture And Craft Fair Indonesia (JIFFINA)



Pameran dilaksanakan setiap tahun sekali pada tanggal 10-13 Maret 2018 di Jogja Ekspo Center, Yogyakarta.

Dengan peserta berjumlah 6 orang pengrajin. Dalam pelaksanaan pameran yang bertemakan furniture ini telah menghasilkan omset sebesar Rp. 2.500.000 tiap peserta.

### 3. Gelar Produk Kreatif Dan Investasi Daerah Expo (GPKN Ekspo)



Pameran dilaksanakan pada tanggal 12-15 April 2018 di Jogja City Mall, Yogyakarta.

Dengan Peserta berjumlah 6 orang pengrajin. Dalam pelaksanaan pameran ini telah menghasilkan omset sebesar Rp. 8.218.000,-

#### 4. International Handicraft (INACRAFT)



Pameran dilaksanakan pada tanggal 12-15 April 2018 di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Dengan Peserta berjumlah 5 orang pengrajin. Dalam pelaksanaan pameran ini telah menghasilkan omset sebesar Rp. 63.687.000,-.

#### 5. Jakarta Fair Kemayoran (PRJ)



Pameran dilaksanakan pada tanggal 23 Mei- 1 Juli 2018 di Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta.

Dengan Peserta berjumlah 24 orang pelaku usaha. Dalam pelaksanaan pameran ini telah menghasilkan omset sebesar Rp. 262.131.000,-.

#### 6. Bantul Ekspo



Pameran dilaksanakan setiap tahun sekali pada tanggal 27 Juli – 6 Agustus 2018 di Pasar Seni Gabusan, Bantul, Yogyakarta.

Pameran Bantul Ekspo merupakan rangkaian event menyambut Hari jadi Kabupaten Bantul. Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah menghasilkan omset sebesar Rp. 1.100.838.080 dan jumlah pengunjung mencapai 84.621 pengunjung.

### 7. **Tourism Trade And Investment Ekspo (Batam)**



Pameran dilaksanakan pada tanggal 20-23 September 2018 Mega Mall Batam Center, Batam. Dengan Peserta berjumlah 3 orang pelaku usaha. Dalam pelaksanaan pameran ini telah menghasilkan omset sebesar Rp. 68.095.000,-.

### 8. **Pameran Indocraft (Pameran Jakarta)**

Pameran dilaksanakan pada tanggal 21-25 November 2018 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Dengan Peserta berjumlah 4 orang pelaku usaha. Dalam pelaksanaan pameran ini telah menghasilkan omset sebesar Rp. 13.880.000,-.



### 3.3 Akuntabilitas Anggaran



Dari kemampuan keuangan daerah, maka jumlah pendanaan yang untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebesar Rp24.683.697.341,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp23.533.722.621,- atau sebesar 95,34%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

*Tabel 3. 20 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018*

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	4.603.250.629	4.173.601.805	90,66
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	10.664.250.629	10.410.438.631	97,62
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	1.831.159.950	1.783.750.300	97,41
<b>Jumlah</b>		17.098.912.579	16.367.790.736	95,72
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		7.584.784.762	7.165.931.885	94,48
<b>Total Belanja Langsung</b>		24.683.697.341	23.533.722.621	95,34

Sumber: [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id)

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp17.098.912.579,- atau sebesar 95,12% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp7.584.784.762 atau sebesar 94,48% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat dengan besaran anggaran 43,20% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran meningkatnya pertumbuhan ekspor sebesar 7,42% dari total anggaran belanja langsung.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas akuntabilitas keuangan dapat menggunakan rumus rasio efektifitas berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran tersebut menggunakan kategori nilai sebagai berikut :

- (1) Sangat tidak efektif (0 – 40%)
- (2) Tidak efektif (40% - 60%)
- (3) Cukup efektif (60% - 80%)
- (4) Efektif (80% - 100%)
- (5) Sangat efektif (> 100%)

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 95,34% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja berada pada kategori **efektif**. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 95,72% (kategori efektif), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94,48% (kategori efektif).

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU jumlah pasar tipe A sebesar 97,62%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU pertumbuhan PDRB kategori perdagangan sebesar 90,66%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.21 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,76	6,02	126,47	4.603.250.629	4.173.601.805	90,66
2	Jumlah pasar tipe A	1	1	100	10.664.250.629	10.410.438.631	97,62
3	Pertumbuhan Nilai Ekspor	7,10	13,96	196,62	4.603.250.629	4.173.601.805	90,66

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

### 3.4 Efisiensi Sumber Daya



Tabel 3.22 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa	%
1	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4.603.250.629	4.173.601.805	429.648.824	9,33
2	Jumlah pasar rakyat tipe A	10.664.250.629	10.410.438.631	253.811.998	2,38
3	Pertumbuhan ekspor	4.603.250.629	4.173.601.805	429.648.824	9,33
<b>Jumlah</b>		17.098.912.579	16.367.790.736	731.121.843	4,28
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		7.584.784.762	7.165.931.885	418.852.877	5,52
<b>Total Belanja langsung</b>		24.683.697.341	23.533.722.621	1.149.974.720	4,66

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

#### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>=100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya ekspor daerah	Pertumbuhan Ekspor	196.62	97.41	2.59
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	100	97.62	2.38
3	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	126.47	90.66	9.34

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa silpa Dinas Perdagangan sebesar 4,66% atau setara dengan Rp1.149.974.720,-.Silpa tersebut merupakan sisa dari tender pelaksanaan pekerjaan fisik seperti revitalisasi pasar/rehabilitasi pasar dan pembangunan kawasan PKL, serta sisa tender pengadaan kendaraan roda 4 dan peralatan metrologi.

### 3.5 Kinerja Lain-lain

#### 3.3.1 Sertifikat ISO 9001:2015

Salah satu kegiatan di Dinas Perdagangan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah kegiatan Peningkatan Sistem Manajemen Mutu dengan tujuan untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015. Dasar dalam penerapan ISO 9001:2015 di Pemerintahan yaitu Pelayanan Publik sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik. ISO ini penting bagi pelayan publik karena ini merupakan pengakuan dari lembaga yang mensyaratkan variabel-variabel sistem manajemen yang harus dipenuhi OPD;

ISO 9001: 2015 adalah standar dokumen (Standard/ Persyaratan) yang mencantumkan persyaratan yang harus dijalankan oleh organisasi dan harus dijaga implementasinya. Ada beberapa dokumen standar yang berbeda dalam ISO 9000 , tapi hanya ISO 9001-2015 yang bisa disertifikasi. ISO 9001: 2015 adalah standar terbaru dari Sistem Manajemen Mutu ini, dan “2015” adalah tahun revisi terbaru dari sistem Manajemen Mutu itu.

Untuk proses ISO ini ada 2 tahapan. Tahapan I adalah persiapan, dimana dilakukan beberapa kali pendampingan untuk pelatihan pemahaman/awareness, pembentukan Tim ISO, pendampingan audit internal, komplain, dan resiko, pembuatan dan pengesahan dokumen, serta persiapan audit sertifikasi. Dalam hal pendampingan, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dibantu oleh Pendamping ISO dari CV. Gama Solution (tim Qomarudin, M.Kes);

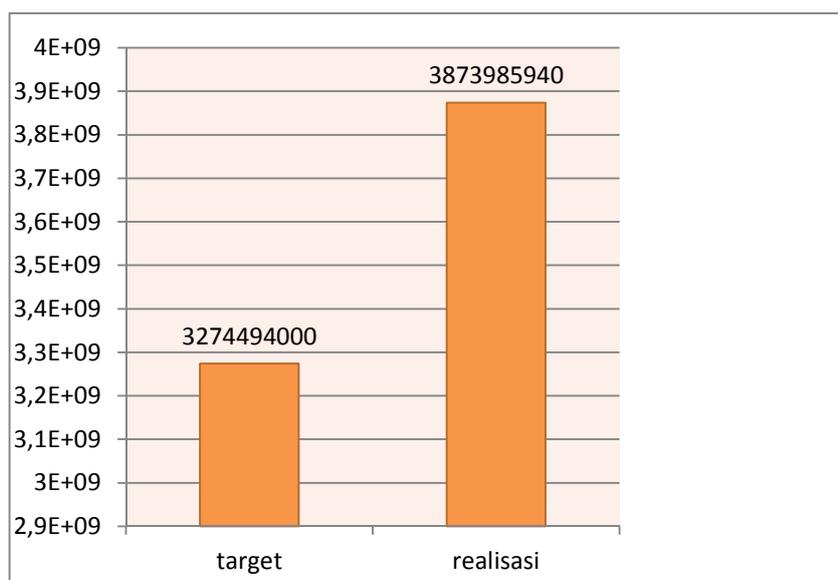


Hal-hal yang telah dipersiapkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terkait ISO 9001:2015 antara lain adalah beberapa dokumen ISO ( Standar Operasional Prosedur ) antara lain Buku Manual Mutu, Prosedur Kerja (SOP), Sasaran Mutu; laporan tim survey/komplain, laporan tim resiko, dan laporan tim audit internal; Setelah tahapan persiapan selesai, dilakukan proses tahapan II yaitu proses audit oleh lembaga sertifikasi. Untuk audit, Auditor untuk proses sertifikasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dilakukan oleh Badan Sertifikasi Nasional NQA Indonesia. Pada tanggal 30 Oktober 2018 akhirnya Dinas

Perdagangan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 .

### 3.3.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Perdagangan mempunyai unit ekonomi yang memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul yaitu dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar, MCK pasar, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari target PAD sebesar Rp 3.274.494.000,00 mampu tercapai sebesar Rp 3.873.985.940 atau terealisasi sebesar 118,31%. PAD terbesar bersumber dari retribusi pelayanan pasar berupa sewa kios/los.



Gambar 3.10 Target dan Realisasi PAD Tahun 2018

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2011-2018

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	2.359.176.900	2.806.066.775	118,94%
2015	3.380.549.050	3.690.777.725	109,18%
2016	2.700.000.000	2.893.491.150	107,17%
2017	3.423.000.000	3.732.640.519	109,05%
2018	3.274.494.000	3.873.985.940	118,31%

### 3.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap

aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan.

*Tabel 3.24 Nilai rata-rata unsur pelayanan*

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Prosedur pelayanan	3,167
U2	Persyaratan pelayanan	3,393
U3	Kejelasan petugas pelayanan	3,235
U4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3,420
U5	Tanggung jawab petugas pelayanan	3,433
U6	Kemampuan petugas pelayanan	3,280
U7	Kecepatan pelayanan	3,280
U8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3,067
U9	Kesopanan dan keramahan petugas	3,447
U10	informarsi ketentuan biaya/atau tanpa biaya	3,173
U11	informarsi ketentuan biaya/atau tanpa biaya	3,423
U12	ketepatan pelaksanaan	3,360
U13	kenyamanan	3,167
U14	keamanan	3,187

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa 14 unsur pelayanan memperoleh nilai persepsi di atas 3 dengan nilai tertinggi pada unsur Kesopanan dan keramahan petugas. Kelima unsur dengan nilai tertinggi adalah :

- a. Kesopanan dan keramahan petugas
- b. Tanggung jawab petugas pelayanan
- c. informarsi ketentuan biaya/atau tanpa biaya
- d. Kedisiplinan petugas pelayanan

Hal tersebut memperlihatkan bahwa dari sisi petugas atau karyawan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sudah memiliki kesopanan dan keramahan pelayanan yang bagus meski harus tetap dipertahankan. Unsur pelayanan dengan nilai terendah adalah pada unsur Keadilan mendapatkan pelayanan. Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan

pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul untuk keadilan dalam pelayanan masih perlu dievaluasi dan diperbaiki.

Hasil analisis terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang sudah disebar kepada responden menunjukkan bahwa nilai IKM Dinas Perdagangan Tahun 2018 adalah **81,71**

*Tabel 3.25 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan*

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Dengan nilai IKM (Nilai Interval Konversi IKM) sebesar 81,71 dan melihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul kategori “**SANGAT BAIK**”.

Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.



### Gambar 3.11 Dokumentasi Berbagai Kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2018



Sambutan Sekda Kabupaten Bantul pada Opening Meeting ISO 9001:2015



Sambutan Ketua Tim Audit Eksternal ISO 9001:2015



Opening Meeting ISO 9001:2015



Closing Meeting Audit Eksternal ISO 9001:2015



Pelatihan Manajemen Perdagangan Luar Negri



Pengawasan penggunaan LPG oleh usaha kecil menengah



Proses pembangunan kawasan PKL

## BAB IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 sasaran, 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar **140,89%** atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dipenuhi sesuai dengan harapan. Sebaliknya dengan terdapatnya anggaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, diakui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi.

### 4.2 *The Next Steps*

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi akan menjadi tidak memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan

upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Berikut permasalahan dan solusi yang berkaitan dengan pencapaian target indikator kinerja:

Tabel 4.1 Permasalahan dan Solusi

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Terjadinya gejolak harga beberapa jenis bahan pokok	Untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga perlu dilakukan pemantauan secara kontinyu dan ditindaklanjuti dengan koordinasi intensif dengan pelaku pasar, melakukan kerjasama dengan daerah lain yang menjadi pemasok bahan pokok, dan melaksanakan operasi pasar
2	pengawasan terkait dengan kualitas dan keamanan barang beredar belum optimal	Pemantauan kualitas barang beredar dilakukan melalui pengujian mutu secara berkelanjutan dan diperlukan penegakan hukum secara terpadu
3	Distribusi barang komoditas bahan pokok masih cukup panjang untuk bisa sampai pada tingkat pedagang pasar, sehingga berdampak terhadap harga produk yang mahal ditingkat konsumen.	Memutus jalur distribusi barang agar lebih cepat dan efisien
4	Kebutuhan akses pasar atas produk UMKM masih luas namun upaya promosi dan pembentukan jejaring pemasaran masih belum optimal	Pemanfaatan teknologi informasi, promosi, peningkatan nilai tambah, kualitas dan diversifikasi produk sebagai upaya peningkatan kapasitas jaringan pemasaran bagi UMKM agar dapat diterima oleh pasar mancanegara dan pasar dalam negeri
5	Daya saing produk yang semakin tinggi dengan berlakunya MEA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan promosi yang lebih intensif.</li> <li>- Peningkatan daya saing.</li> </ul>
6	Mindset / pola pikir dan perilaku pedagang pasar baik dalam hal manajemen, layanan dan kebersihan lingkungan pasar yang belum maju	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Manajemen Pasar</li> <li>- Meningkatkan kapasitas pelayanan kebersihan dengan menambah armada truck sampah.</li> </ul>
7	Masih ada rentenir yang beroperasi di pasar rakyat/tradisional sehingga mengurangi tingkat laba usaha pedagang.	Memperluas jangkauan/distribusi pengelolaan dana bergulir serta menambah modal, agar semakin maksimal pedagang yang terlayani.

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS PERDAGANGAN**

Kompleks II Perkantoran Pemkab Bantul  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul,  
D I Yogyakarta, Kode Pos 55711  
Telepon (0274)367338 Faks (0274)367504  
Email: [dinas.perdagangan@bantulkab.go.id](mailto:dinas.perdagangan@bantulkab.go.id)  
website: [perdagangan.bantulkab.go.id](http://perdagangan.bantulkab.go.id)

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018 (Belanja Langsung) s/d Bulan Desember**  
**DINAS PERDAGANGAN**

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)			Fisik (Pembobotan)			Keuangan					Lokasi	Bagian/Seksi	
				Target	Realisasi	Deviasi	Bobot	Bobot Target	Bobot Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)			Deviasi
1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
1.1	01.36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	490.309.372	100,00	100,00	0,00	0,020	2,000	2,000	0,000	490.309.372	100,000	474.884.107	96,854	3,146	Dinas Perdagangan dan 33 Pasar Rakyat	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.2	01.37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1.045.029.778	100,00	100,00	0,00	0,042	4,200	4,200	0,000	1.045.029.778	100,000	1.012.748.955	96,911	3,089	Kabupaten Bantul, DIY, prov/kab lain	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.3	01.38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4.358.030.612	100,00	100,00	0,00	0,177	17,700	17,700	0,000	4.358.030.612	100,000	4.041.154.565	92,729	7,271	Dinas Perdagangan dan 33 Pasar Rakyat	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
2.1	02.50	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	57.875.000	100,00	100,00	0,00	0,002	0,200	0,200	0,000	57.875.000	100,000	53.585.000	92,587	7,413	Dinas Perdagangan Kab Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
2.2	02.51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	576.590.000	100,00	100,00	0,00	0,023	2,300	2,300	0,000	576.590.000	100,000	569.048.900	98,692	1,308	Dinas Perdagangan Kab Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
2.3	02.52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	275.875.000	100,00	100,00	0,00	0,011	1,100	1,100	0,000	275.875.000	100,000	256.183.150	92,862	7,138	Dinas Perdagangan Kab Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
2.4	02.53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	352.250.000	100,00	100,00	0,00	0,014	1,400	1,400	0,000	352.250.000	100,000	338.952.308	96,225	3,775	Dinas Perdagangan Kab Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
2.5	02.54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	45.000.000	100,00	100,00	0,00	0,002	0,200	0,200	0,000	45.000.000	100,000	44.757.400	99,461	0,539	Dinas Perdagangan Kab Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
3	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
3.1	05.18	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	178.525.000	100,00	100,00	0,00	0,007	0,700	0,700	0,000	178.525.000	100,000	174.525.000	97,759	2,241	DIY/luar DIY	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan															
4.1	06.09	Penyusunan sistem manajemen mutu	126.550.000	100,00	100,00	0,00	0,005	0,500	0,500	0,000	126.550.000	100,000	124.596.500	98,456	1,544	Dinas Perdagangan Kab Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
4.2	06.17	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	78.750.000	100,00	100,00	0,00	0,003	0,300	0,300	0,000	78.750.000	100,000	75.496.000	95,868	4,132	Dinas Perdagangan Kab Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
5	15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan															
5.1	15.04	Pelayanan Kemetrologian Daerrah	2.408.427.000	100,00	100,00	0,00	0,098	9,800	9,800	0,000	2.408.427.000	100,000	2.073.074.605	86,076	13,924	UPT Metrologi Kab Bantul	Dinas Perdagangan - UPT Metrologi
6	17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor															
6.1	17.09	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	285.755.000	100,00	100,00	0,00	0,012	1,200	1,200	0,000	285.755.000	100,000	274.583.950	96,091	3,909	Kabupaten Bantul, DIY, prov/kab lain	Bidang Pengembangan Perdagangan - Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan
6.2	17.16	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	1.545.404.950	100,00	100,00	0,00	0,063	6,300	6,300	0,000	1.545.404.950	100,000	1.509.166.350	97,655	2,345	Kabupaten Bantul, DIY, prov/kab lain	Bidang Pengembangan Perdagangan - Seksi Pengembangan Ekspor
7	18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri															
7.1	18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	247.175.000	100,00	100,00	0,00	0,010	1,000	1,000	0,000	247.175.000	100,000	243.564.650	98,539	1,461	Kabupaten Bantul, DIY, prov/kab lain	Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan - Seksi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok
7.2	18.09	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang	83.025.000	100,00	100,00	0,00	0,003	0,300	0,300	0,000	83.025.000	100,000	81.867.000	98,605	1,395	Kabupaten Bantul, DIY, prov/kab lain	Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan - Seksi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok
7.3	18.16	Peningkatan pelayanan perdagangan	89.000.000	100,00	100,00	0,00	0,004	0,400	0,400	0,000	89.000.000	100,000	82.610.000	92,820	7,180	Kabupaten Bantul	Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan - Seksi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok

8	19	<b>Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan</b>															
8.1	19 . 03	penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	750.000.000	100.00	100.00	0.00	0.030	3.000	3.000	0.000	750.000.000	100.000	699.186.351	93.225	6.775	Kecamatan Imogiri	Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan - Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan
8.2	19 . 07	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1.025.875.000	100.00	100.00	0.00	0.042	4.200	4.200	0.000	1.025.875.000	100.000	993.299.199	96.825	3.175	Kabupaten Bantul	Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan - Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan
9	20	<b>Program Pemberdayaan Pedagang</b>															
9.1	20 . 05	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	906.700.000	100.00	100.00	0.00	0.037	3.700	3.700	0.000	906.700.000	100.000	889.399.500	98.092	1.908	Kabupaten Bantul	Bidang Pengembangan Pasar - Seksi Promosi dan Kemitraan
10	22	<b>Program Penataan Pasar Rakyat</b>															
10.1	22 . 01	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	3.853.031.629	100.00	100.00	0.00	0.156	15.600	15.600	0.000	3.853.031.629	100.000	3.768.470.431	97.805	2.195	Kabupaten Bantul	Bidang Pengembangan Pasar - Seksi Sarana dan Prasarana
10.2	22 . 02	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	11.500.000	100.00	100.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	11.500.000	100.000	10.625.500	92.396	7.604	Kecamatan Imogiri	Bidang Pengembangan Pasar - Seksi Pendapatan
10.3	22 . 03	Revitalisasi Pasar Rakyat	5.735.449.000	100.00	100.00	0.00	0.232	23.200	23.200	0.000	5.735.449.000	100.000	5.586.175.300	97.397	2.603	Kabupaten Bantul	Bidang Pengembangan Pasar - Seksi Sarana dan Prasarana
10.4	22 . 04	Intensifikasi Pendapatan Pasar	157.570.000	100.00	100.00	0.00	0.006	0.600	0.600	0.000	157.570.000	100.000	155.767.900	98.856	1.144	33 pasar rakyat di Kabupaten Bantul	Bidang Pengembangan Pasar - Seksi Pendapatan
Jumlah			24,683,697,341	100.000	100.000			99.900	99.900		24,683,697,341	100.000	23,533,722,621	95.341			